

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Gambaran Umum Tentang Pemulung

Pemulung merupakan sebuah pekerjaan meskipun keberadaannya kurang disenangi oleh sebagian besar masyarakat. bekerja sebagai pemulung memiliki resiko bahaya yang cukup besar karena tempat kerja yang sangat berbahaya dan tidak adanya perlindungan kerja yang maksimal diberikan oleh pemerintah. Paling tidak mereka melindungi diri mereka secara sederhana, peralatan yang digunakan juga jauh dari kata aman. Usaha keselamatan kerja itu standar, antara lain :

- a. Topi, untuk melindungi kepala dari cuaca panas, hujan, kotoran, dan benda keras.
- b. Kacamata, gelap, untuk melindungi mata dari cahaya matahari.
- c. Masker, berupa penutup hidung dan mulut yang berguna untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, bahan kimia, dan kuman penyakit.
- d. Jaket atau baju lengan panjang, untuk melindungi kulit dari sengatan matahari dan untuk menjaga kebersihan badan dari sampah yang membawa kuman penyakit.
- e. Sarung tangan, untuk perlindungan diri terhadap kontak langsung dengan sampah dan barang tajam.

- f. Sepatu boots, untuk melindungi kaki dari dari bahan-bahan tajam dan dari parasit tanah (cacing).²¹

Selain alat pelindung tubuh, pemulung juga membawa alat lain yang berguna untuk mendukung pekerjaannya sebagai pengumpul barang bekas, antara lain:

- a. Keranjang yang dipanggul di pundak yang berguna untuk menampung barang hasil pulung.
- b. *Ganco*, digunakan sebagai alat pengambil sampah untuk mempermudah pemungutan sampah.

Pemulung juga dijuluki sebagai “laskar mandiri” karena dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan usaha tersebut itu turut membantu pembangunan suatu kota. Maka profesi pemulung dapat digolongkan ke dalam definisi kerja sektor informal, yaitu sebagai bagian dari sistem ekonomi yang tumbuh untuk menciptakan kerja dan bergerak di bidang produksi serta barang dan jasa dan dalam usahanya menghadapi keterbatasan modal, keterampilan, dan pengetahuan.²² Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- (2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- (3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- (4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi

²¹ Tri Martiana, “*Status Kesehatan Pemulung di Lokasi Pembuangan Sampah Kepuuh Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya*”, (Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya, 1992), hal. 24.

²² Karjadi Mintaroem, “*Penghasilan Pemulung di Kotamadya daerah tingkat II Surabaya*”, (Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya, 1989), hal. 9.

lemah belum sampai ke sektor ini. (5) Unit usaha sudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lain. (6) Teknologi yang digunakan masih primitive. (7) Modal dan perputaran usaha relative kecil, sehingga skala operasional juga relative kecil. (8) Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. (9) Pada umumnya unit kerja termasuk golongan “One Man Enterprise” dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga. (10) Sumber dana modal pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi. (11) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan menengah.²³

Adapula ciri-ciri baku lain dari sektor informal yang diungkap, yaitu:

(1) Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya sekitarnya, (2) Ukuran usahanya umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan usaha keluarga. (3) Untuk menopang aktivitasnya digunakan teknologi yang tepat guna dan memiliki sifat yang padat karya. (4) Tenaga kerja yang bekerja dalam aktivitas sektor ini telah terdidik dan terlatih dalam pola-pola tidak resmi. (5) Seluruh aktivitas mereka dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah, dan (6) Aktivitas mereka bergerak dalam pasar sangat bersaing.²⁴

Sejalan dengan uraian ciri-ciri sektor informal diatas, keberadaan pemulung salah satu profesi dalam sektor informal yang berperan sebagai penampung ledakan penduduk yang masuk pada pasar kerja, sementara menunggu kegiatan ekonomi yang lebih baik.

Sektor informal terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik yang membuat masyarakat melirik sektor ini. Faktor pendorong adalah hal-hal yang mendorong angkatan kerja untuk meninggalkan tempatnya mencari kemungkinan yang lebih untuk memperoleh pekerjaan

²³ Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 91.

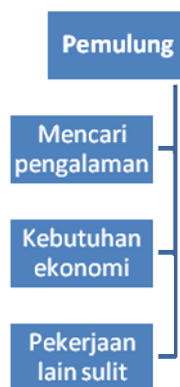
²⁴ Emanuel Subangun, *Dari Saminisme ke Postmodernisme*, (Yogyakarta: CRI Alocita, 1994), hal 54.

dan pendapatan di kota. Sedangkan faktor penarik umumnya terpusat di kota. Oleh karena cukup tersedianya infrastruktur sosial dan industri dengan upah yang relative tinggi. Tetapi pada kenyataannya, sektor formal belum memberikan lapangan kerja yang cukup bagi pendatang sebagai akibat dari urbanisasi.

Keadaan ini mendorong masyarakat beralih ke sektor nformal yang dapat menampung semua pencari kerja karena tidak memerlukan modal besar dan pengalaman yang bagus. Salah satu profesi yang dilirik adalah pemulung. Adapun faktor pendorong dan penarik masyarakat menjadi pemulung, antara lain :

Diagram 1

Faktor Pendorong Menjadi Pemulung



Sumber Data : Penelitian Karjadi Mintaroem, *Penghasilan Pemulung di Kotamadya daerah tingkat II surabaya Tahun 1989.*

Diagram 2**Faktor Penarik Menjadi Pemulung**

Sumber Data : Penelitian Karjadi Mintaroem, *Penghasilan Pemulung di Kotamadya daerah tingkat II surabaya Tahun 1989.*

2. Tinjauan Tentang Kondisi Pemulung

Keberadaan pemulung jalanan dapat ditinjau dari beberapa dimensi sosial yang ada, antara lain dimensi sosial budaya, dimensi sosial ekonomi, dan dimensi lingkungan.

a. Kondisi Pemulung Ditinjau Dari Dimensi Sosial Ekonomi

Sebenarnya keberadaan pemulung berperan dalam pembangunan meskipun tampaknya remeh. Di samping perannya dalam menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dalam memenuhi penghasilan untuk keluarga atau biasa disebut Laskar Mandiri²⁵. Oleh karena itu, seharusnya para pemulung mendapatkan pembinaan yang tepat agar dapat menempatkan diri dalam masyarakat.

²⁵ Karjadi Mintaroem, "*Penghasilan Pemulung di Kotamadya daerah tingkat II surabaya*",. (Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya, 1989), hal. 2.

Selain itu, pemulung turut serta dalam menghemat devisa Negara dalam kegiatan ekonominya, terutama dalam penyiapan bahan baku yang murah dari barang-barang bekas. Seperti, gelas, plastik, besi, kaleng, kertas, karton, dan sebagainya. Barang-barang itu akan diolah kembali oleh pabrik-pabrik dengan proses daur ulang untuk dijadikan barang-barang yang bermanfaat dan turut menggiatkan kegiatan ekonomi.

Meskipun peranan pemulung sangat vital dalam mata rantai jaringan transaksi barang-barang bekas, namun mereka tidak berdaya untuk mempertahankan “haknya” sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka berikan. Ini dapat terlihat dari harga barang-barang bekas dari pemulung relatif murah jika dibandingkan dengan harga jual pengepul ke pabrik-pabrik.

b. Kondisi Pemulung Ditinjau Dari Dimensi Sosial Budaya

Ditinjau dari kondisi sosial budaya, para pemulung digolongkan ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki sub kultur tersendiri, yaitu kultur yang mencerminkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan hidup dari golongan masyarakat miskin.²⁶

Tata nilai dan tata norma yang ada berbeda dengan tata nilai dan tata norma dalam masyarakat, dan biasanya cenderung dinilai negatif. Namun dari sudut pandang mereka, apa yang ada itu tidak dianggap

²⁶ Susianingsih, “*kajian geografis kegiatan pemulung jalanan di kecamatan sawahan kota surabaya*” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2010), hal. 15..

sebagai suatu yang kurang baik, walaupun oleh sebagian besar masyarakat cara hidup mereka dianggap kurang wajar, karena tampak menyimpang dari tujuan yang biasa diidam-idamkan oleh warga masyarakat oleh masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya para pemulung ingin hidup bebas, tidak mau terikat dengan aturan dan norma, sehingga bila dibandingkan dengan kondisi yang ada di kalangan warga masyarakat lainnya timbul perbedaan yang mencolok, terutama pada segi estetika, etika, dan idealisme hidup.

Dalam kehidupan pemulung yang tergolong masyarakat miskin, rasa estetika tanpaknya sangat rendah. Misalnya, mereka tidak merasa perlu berpenampilan rapi. Terkadang, walaupun belum mandi mereka sudah berkeliaran kemana-mana dengan pakaiiaan kumal dan kotor. Berpenampilan seperti itu tentu saja kurang diterima masyarakat di tempat umum, karena mengganggu pemandangan dan menyebarkan bau yang kurang sedap terhadap orang-orang sekelilingnya. Rasa etika hidup juga banyak dijumpai hal-hal yang kurang baik. Seolah-olah mereka tidak mengenal rasa malu. Pakaiiaan yang mereka kenakan kurang sopan untuk dikenakan di tempat umum.

Sedangkan tentang idealisme hidup, mereka tidak terlalu berpikir ke depan. Mereka mengutamakan kebutuhan sesaat. Oleh karena itu, banyak diantara pemulung cenderung beristirahat mencari barang-barang bekas apabila merasa telah mendapatkan sejumlah uang untuk beberapa hari.

Walaupun pemulung digolongkan ke sub kultur semacam ini, namun sebenarnya mereka masih memiliki kondisi sosial budaya yang lebih baik daripada gelandangan dan pengemis. Mereka memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Hasrat untuk mandiri cukup besar, sehingga pemulung lebih bisa diarahkan dan dibina kepada kehidupan yang lebih baik.

c. Kondisi Pemulung Ditinjau Dari Dimensi Lingkungan

Ditinjau dari dimensi lingkungan peran pemulung sangat besar. Mereka ikut andil dalam menciptakan kebersihan di lingkungan perkotaan. Dengan jalan mengurangi volume sampah dari jenis yang justru tidak dapat atau sukar hancur secara alamiah. Meskipun secara kuantitatif pengurangannya kecil, sehingga kurang terlihat pengaruhnya.

Sedangkan di lain pihak, dalam kegiatannya mengumpulkan barang-barang bekas, para pemulung tidak atau kurang memikirkan kebersihan dan keindahan lingkungan. Rupanya mereka merasa tidak wajib untuk turut menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan. Seperti, banyak diantara mereka dengan seenaknya mendirikan gubuk-gubuk luar di sembarang tempat dan menumpuk barang-barang bekas di depan gubuk mereka.

Perlu ditinjau dampak dari keberadaan pemulung jalanan terhadap aspek lingkungan yang lain, dalam hal ini sejauh mana pengaruhnya terhadap sistem keamanan lingkungan. Ternyata tidak

semua pemulung berperilaku jujur, terkadang ada juga yang mau mengambil hak milik orang lain yang bukan barang-barang bekas.²⁷

Dengan kenyataan yang demikian itu maka kehadiran para pemulung jalanan di lingkungan daerah pemukiman sering menimbulkan curiga dan khawatir pada sebagian penduduk.

3. Konsep Kemiskinan Pada Pemulung

Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia kurang berkualitas. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengandung upaya menghapuskan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Oleh karena itu, dalam pengembangan sumber daya manusia salah satu program yang harus dilaksanakan adalah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan.

Kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan baru apabila tidak ditangani, seperti: tingginya angka kriminalitas, suburnya tingkah laku menyimpang dalam masyarakat dan berpotensi sebagai penyebab kerusakan sosial bahkan dapat mengguncang stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, menurut *keban* kemiskinan dapat digunakan sebagai indikator

²⁷ Susianingsih, "*kajian geografis kegiatan pemulung jalanan di kecamatan sawahan kota surabaya*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2010), hal. 19.

penilaian seberapa jauh pemerintah telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pembangunan.²⁸

Menurut Sar A. Leviatan (1980), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal

Menurut Bradley R. Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Menurut Emil Salim, kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Menurut faktor kemiskinan atau mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri yaitu :

(a) Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun keterampilan. (b) Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. (c) Tingkat pendidikan mereka rendah. Waktu mereka habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa untuk belajar. (d) Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada maka kecil sekali. (e) Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak memiliki kemampuan (skill) atau pendidikan.²⁹

Dari ciri-ciri diatas, dapat dilihat bahwa pemulung termasuk kedalam golongan warga miskin. Pemulung merupakan golongan

²⁸ Susianingsih, "*kajian geografis kegiatan pemulung jalanan di kecamatan sawahan kota surabaya*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2010), hal. 11.

²⁹ Susianingsih, "*kajian geografis kegiatan pemulung jalanan di kecamatan sawahan kota surabaya*" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2010), hal. 12.

masyarakat yang diidentikan dengan kemiskinan. Meskipun tidak semua pemulung merupakan warga miskin, bahkan banyak diantara mereka mapan dalam hal ekonomi. Tetapi mereka dipandang miskin dalam hal lain. Menurut Ellis dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, dan politik, yaitu :

a. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomis kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya alam yang dimaksud mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya finansial, tetapi segala bentuk kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat pendapatan seseorang sangat mungkin telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum (diatas garis kemiskinan absolut), tetapi bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat (pendidikan, kesehatan,dll) pada saat itu masih sangat rendah, maka orang itu tergolong miskin. Menurut konsep ini, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia saat itu. Konsep ini disebut kemiskinan relatif.³⁰

b. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat.

³⁰ Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 249.

Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Faktor-faktor penghambat dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang, kemiskinan ini biasa disebut dengan kemiskinan struktural. Sedangkan kemiskinan struktural sendiri berarti kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan sekitar, bahkan kekurangan perlindungan dari hukum dan pemerintah.

Faktor yang kedua adalah faktor penghambat yang datang dari diri seseorang atau sekelompok orang, misalnya rendahnya tingkat pendidikan karena hambatan budaya. Kemiskinan ini muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok orang itu sendiri. Mereka tidak berintegrasi dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan. Keadaan yang demikian muncul karena lingkungan atau budaya masyarakat itu sendiri dan cenderung diturunkan dari generasi ke

generasi. Dengan kata lain, kemiskinan sosial tipe ini dapat dikatakan sebagai akibat adanya kebudayaan kemiskinan.

c. Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik menekankan pada kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial (politik) yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang. Hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kemiskinan politik yaitu :

- 1) Bagaimana sekelompok orang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dalam masyarakat.
- 2) Bagaimana sekelompok orang dapat turut serta dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber daya alam yang ada.
- 3) Kemampuan untuk turut serta dalam membentuk keleluasaan dalam masyarakat yang akan dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah.

Kemiskinan politik dapat diukur salah satunya dengan cara mengamati partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Semakin besar proporsi penduduk usia pemilih yang melakukan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat tinggi.³¹

³¹Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 251-254.

4. Jenis-Jenis Pemulung

Dalam definisi yang umum, pemulung adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari mengumpulkan barang bekas atau *gresek*.

Berdasarkan tempat tinggalnya pemulung dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pemulung tidak menetap atau pemulung gelandangan atau pemulung liar adalah pemulung yang tidak mempunyai tempat tinggal relatif menetap dan hidup atau tinggal di jalanan. Biasanya disebut pemulung jalanan.
- b. Pemulung menetap adalah pemulung yang mempunyai tempat tinggal dan hidup atau tinggal di suatu tempat atau kampung tertentu dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai pemulung. Biasanya pemulung menetap menyewa rumah secara bersama-sama di suatu tempat tertentu, pemulung yang tinggal di rumah permanen dan semi permanen yang berlokasi di tempat pembuangan akhir atau sekitarnya, atau penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai pemulung. Seperti, pemulung LPA, pemulung sayuran di pasar, dan sebagainya.³²

Menurut *Y. Argo Twikromo*, pemulung jalanan merupakan istilah yang digunakan dalam studinya untuk menggambarkan pemulung yang hidup di jalanan. Istilah ini dipakai untuk membedakan pemulung tidak menetap (pemulung yang tidak mempunyai tempat tinggal relatif menetap dan hidup atau tinggal di jalanan) dan istilah pemulung menetap (pemulung

³² Y. Argo Twikromo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal. 74

yang mempunyai tempat tinggal dan hidup atau tinggal di suatu tempat atau kampung tertentu). Berdasarkan perspektif pemerintah dan masyarakat pada umumnya, kelompok pemulung jalanan ini dikategorikan sebagai gelandangan.³³

Istilah “gelandangan” berasal dari “gelandang” yang berarti selalu mengembara, yang berkelana (lelana) menurut istilah dahulu dan yang lebih netral sifatnya. Menurut deskripsi tersebut gelandangan dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak, serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, dengan ditambah makan di sembarang tempat.³⁴

Menurut *prof. Dr. Ny. Saparina Sadli*, istilah gelandangan secara asosiatif mengingatkan kita pada anggota masyarakat yang tidur di kaki lima, yang mengorek-orek sampah, yang sehari-semalam berada di emperan pasar, yang meminta sedekah pada orang yang duduk di mobil.³⁵

Selain itu gelandangan adalah golongan masyarakat yang hidup dalam kondisi “serba tidak”, karena biasanya mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti atau tetap, tidak dapat merencanakan hari depan untuk dia dan anaknya, tidak memiliki penghasilan tetap. Daftar tidak ini dapat diperpanjang

³³ Y. Argo Twikromo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal. 42.

³⁴ Onghokham, “Gelandangan Sepanjang Zaman” dalam Paulus Widiyanto (ed), *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 3.

³⁵ Saparina Sadli, “Suatu Catatan Masalah Gelandangan”, dalam Ramdhan Naning (ed), *Probelam Gelandangan Dalam Tinjauan Pendidikan dan Psikologi*. (Bandung: CV. Armico, 1983), hal. 67.

dengan menambahkan biasanya mereka tidak berpendidikan formal, tidak selalu terjangkau oleh pelayanan sosial yang ada, dan sebagainya.³⁶

Pemulung jalanan hidup dibawah bayang-bayang ilusi kota dan kehidupan fantastis penampilan kota. Mereka hidup bersama orang jalanan lain yang dikategorikan sebagai gelandangan. Pada kenyataannya ada berbagai macam orang jalanan yaitu pemulung jalanan, pengemis, pekerja seksual, pencuri kecil-kecilan, pencopet, pedagang asongan, dan pengamen yang hidup dijalanan. Banyak diantara mereka dengan mudah berganti profesi, tergantung apakah profesi tersebut menguntungkan mereka atau tidak.

Beberapa pemulung jalanan terkadang harus melakukan beberapa aktivitas sekaligus sebagai strategi untuk bertahan hidup. Seperti, menjadi kuli panggul, sampai mencuri kecil-kecilan apabila ada kesempatan. Namun banyak juga diantara mereka yang benar-benar jujur dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemulung menetap yang mempunyai tempat tinggal yang tetap baik permanen maupun non permanen di sekitar tempat pembuangan sampah sementara atau di tempat pembuangan akhir sampah, memiliki nasib yang sedikit lebih baik daripada pemulung tidak menetap. Keberadaannya sedikit banyak telah diperhatikan oleh pemerintah karena mereka dianggap berperan aktif dalam penanganan sampah yang ada di perkotaan. Karena dengan adanya pemulung dapat mengurangi sampah anorganik seperti,

³⁶ Saparina Sadli, "Suatu Catatan Masalah Gelandangan", dalam Ramdhan Naning (ed), *Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Pendidikan dan Psikologi*. (Bandung: CV. Armico, 1983), hal. 70

plastik, besi, aluminium, dan sebagainya yang tidak dapat diurai oleh tanah. Sehingga hanya meninggalkan sampah organik yang dapat diurai oleh tanah.

Selain itu, keberadaan pemulung yang terfokus di sekitar tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah yang biasanya terletak di pinggiran kota. Hal ini mendapat sambutan baik bagi pemerintah, karena pemulung tidak akan berkeliaran di kota dan mengganggu keindahan dan tata ruang kota.

Dalam segi pekerjaan, mereka memiliki lokasi pencarian barang-barang bekas yang tetap yaitu di tempat pembuangan sampah tersebut. Sehingga, mereka tidak perlu berkeliling kampung ataupun mencari ke jalan-jalan. Karena barang yang mereka cari akan datang sendiri ke tempat kerja mereka. Jam kerjanya juga teratur karena mengikuti jam buka dan tutup tempat pembuangan sampah tersebut, sekitar pukul 05.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB³⁷ mengikuti jam operasional LPA. Penghasilan yang didapatkan pemulung menetap juga jauh lebih banyak dari pada pemulung tidak menetap. Ini dikarenakan jumlah barang-barang bekas yang didapatkan jauh lebih banyak.

Penjualan barang-barang bekas tersebut juga jauh lebih mudah, karena mereka dapat memilih dijual kepada pengepul yang mereka anggap memberi harga yang bagus terhadap barang-barang bekas tersebut. Ini

³⁷ Hasil wawancara dengan Koordinator Jembatan Timbang Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Benowo, (Pak Sapi'i), pada tanggal 25 Mey 2011 pukul 10.30 WIB, di kantornya.

dikarenakan banyak pengepul yang membuka gudang atau *lapaknya* di sekitar LPA. Ini dapat menambah penghasilan pemulung tersebut.

5. Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Sampah

Lokasi atau site sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar LPA. Untuk mendirikan LPA, lokasi merupakan aspek yang paling diperhatikan agar tidak mengganggu aktivitas warga dan agar tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu lokasi LPA harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain:³⁸

a. Lama pemakaian area TPA

Lamanya masa aktif suatu TPA dapat ditentukan melalui beberapa parameter, yaitu kedalaman timbunan, jumlah, tingkat penimbunan, karakter sampah dan praktek operasional. Site seharusnya dipilih sedemikian rupa sehingga memiliki usia yang cukup untuk mengembalikan biaya investasi pengoperasian TPA. Suatu TPA direkomendasikan mempunyai masa aktif minimal 10 tahun.

b. Topografi

Informasi mengenai topografi sangat penting guna merencanakan sistem drainase air permukaan sedemikian rupa sehingga air permukaan dialirkan disekitar lahan TPA dan runoff dari limbah dicegah untuk merusak lingkungan. Selain itu, data tentang

³⁸ modul workshop regional & urban planning, 2006

topografi diperlukan untuk menentukan secara akurat kapasitas area dan tipe serta perluasan galian atau excavation.

c. Tanah

Ketersediaan tanah dengan karakter yang sesuai untuk konstruksi landasan TPA dan sistem penimbunan merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pemeliharaan lokasi TPA. Tanah di sekitar lokasi dapat mempengaruhi tingkat perpindahan zat polutan dan tingkat kekuatan struktur fasilitas yang ada. Sifat tanah yang perlu diperhatikan adalah distribusi ukuran partikel tanah (gradasi atau tekstur), struktur, hubungan antara kelembaban kepadatan dan permeabilitas, dan kemampuan untuk diolah.

d. Geologi

Pengumpulan data geologi di lokasi site bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya geologis, menyediakan informasi bagi perancangan fasilitas, perhitungan kerentanan site terhadap kontaminasi air tanah akibat kondisi hidrologi site. Informasi geologis yang penting bagi tujuan teknis adalah berkaitan dengan bedrock, dan kondisi bedrock. Informasi ini khususnya berguna jika bedrock terletak di atau dekat permukaan bumi dan akan dapat digunakan sebagai bagian dari pondasi fasilitas yang ada di TPA.

e. Hidrogeologi

Kemungkinan tercemarnya air tanah di sekitar lokasi TPA tergantung pada karakteristik hidrogeologi site, antar lain:

- 1) Kedalaman air tanah
- 2) Topografi site dan jenis tanah
- 3) Tingkat infiltrasi tanah di site
- 4) Kedalaman dan sifat bedrock
- 5) Komponen horizontal dan vertical gradien air tanah
- 6) Kecepatan dan arah air tanah
- 7) Kondisi fisografis
- 8) Karakter tanah dan geologi
- 9) Vegetasi
- 10) Tata guna lahan
- 11) Pertimbangan ekonomi dalam pemilihan site³⁹

Selain itu, Pendirian suatu TPA tidak hanya harus memperhatikan lokasinya, tetapi juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

a. Aspek legalitas dan administrasi

- 1) Sesuai dengan peraturan dan perencanaan lokal
- 2) Tidak terlalu dekat dengan kelompok bangunan, min 500m
- 3) TPA tidak terbuka dan terlihat dari jalan atau lingkungan di sekitar TPA
- 4) Jauh dari taman atau tempat rekreasi
- 5) Jauh dari airport, minimal 3 km akibat resiko kecelakaan yang disebabkan tabrakan antar burung (yang banyak mencari makan di TPA) dan pesawat terbang

³⁹ modul workshop regional & urban planning, 2006

6) Polusi suara

b. Aspek geohidrologi

Tanah dan batu terdiri dari berbagai jenis material dan permeabilitas. Permeabilitas bervariasi mulai dari tertinggi yaitu 1010 m/detik, yaitu tanah liat (clay). Kedalaman air tanah, arah aliran air tanah, keberadaan sumur bawah tanah (aquifer) juga akan mempengaruhi penentuan lokasi TPA.

Pertimbangan geologi atau hidrologi sangat penting dalam penentuan lokasi TPA karena adanya cairan lindi (leachate) yang dihasilkan oleh TPA. Jumlah, sifat dan aliran lindi dari TPA tergantung dari teknologi TPA yang digunakan. Sebaran lindi dan proses yang berlangsung di dalam tanah tergantung pada kondisi geologi dan hidrologi. Kondisi geologi dan hidrologi yang sesuai dengan lokasi TPA sangat bervariasi. Selain itu, suatu TPA harus memiliki berbagai fasilitas penunjang, yaitu:

1) Area Stasiun

Area stasiun merupakan area pendukung operasional TPA dan meliputi pintu masuk, area pemulihan, stasiun penimbangan, kantor, bengkel dan gudang mesin, jalan, area pemilahan untuk sampah rumah tangga dan industri, area penyimpanan endapan limbah cair.

2) Area Penimbunan

Jalan permanen, sel-sel penimbunan sampah, kolam cairan lindu, sistem air permukaan, sistem drainase, sistem produksi gas, dan area kebersihan.

3) Pintu Masuk

4) Pagar

B. Kajian Teoritik

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian kali ini riil terdapat dalam masyarakat Pakal. Suatu fakta yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mencoba melihat masalah yang ada di masyarakat tersebut dengan menggunakan paradigma fakta sosial.

Fakta sosial menurut Emile Durkheim dinyatakan sebagai sesuatu (*thing*), yang berbeda dengan ide dan dapat dilihat atau dirasakan. Sesuatu tersebut menjadi obyek penelitian dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pikiran manusia. Arti penting pernyataan Durkheim ini terletak pada usahanya untuk menerangkan bahwa fakta sosial tidak dapat dipelajari melalui introspeksi. Fakta sosial harus diteliti di dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lain.⁴⁰

⁴⁰ George, Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009) hal. 14

Paradigma fakta sosial menurut Durkheim dibagi dalam dua macam yaitu dalam bentuk material yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (*external world*). Dalam hal ini adalah keberadaan LPA Benowo, pemulung, pengepul, dan masyarakat.

Bentuk non-material yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia.⁴¹ Stigma negatif pemulung yang ada dimasyarakat merupakan sesuatu yang nyata karena muncul dari kesadaran manusia yang berkembang menjadi pendapat publik masyarakat, dan keberadaannya dianggap dapat mempengaruhi masyarakat. Selain itu keberadaan LPA juga dianggap mempengaruhi kehidupan masyarakat dari beberapa segi kehidupan.

Selain itu, fakta sosial dikenal dengan adanya kekuatan memaksa eksternal terhadap individu-individu. Adanya kekuatan tadi didukung dengan adanya sanksi-sanksi tertentu atau perlawanan terhadap setiap kegiatan individu yang bertujuan melanggarnya.⁴² Sehingga secara tidak langsung fakta sosial dapat membentuk suatu norma yang berkembang dalam masyarakat dan meskipun tidak tertulis tetapi tetap mengikat anggota masyarakat untuk tetap taat terhadap norma tersebut.

⁴¹ George, Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009) hal. 15.

⁴² Soerjono Soekanto, *Emile Durkheim: Aturan-Aturan Metode Sosiologis*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal 9

Teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Lahirnya fungsionalisme struktural memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya ahli sosiolog Prancis, Emile Durkheim. Masyarakat modern dilihat Durkheim sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal dapat langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dapat dipenuhi maka berkembang suatu keadaan yang bersifat “patologis”. Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium atau sebagai sistem yang seimbang, sedangkan keadaan patologis merujuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial.⁴³

Sebagai contoh dalam masyarakat perkotaan, fungsi kebersihan merupakan kebutuhan yang kompleks dan harus dipenuhi. Apabila fungsi kebersihan tersebut mengalami permasalahan yang besar. Seperti tidak tersedianya Lokasi Pembuangan Sampah (LPA) dan penuhnya kapasitas LPA di suatu kota, hal ini juga pernah terjadi di Kota Surabaya saat ditutupnya LPA Sukolilo dan LPA Lakarsantri oleh para warga dan belum beroperasinya LPA Benowo. Maka, bagian kebersihan kota ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem tersebut dan akhirnya sistem secara keseluruhan. Keadaan inilah yang dimaksud keadaan patologis atau ketidakseimbangan, tetapi pada akhirnya masalah itu menemukan

⁴³ Margaret M. Paloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1979), hal. 25-26.

solusinya yaitu telah dibangunnya LPA Benowo sebagai tempat pembuangan akhir sampah Kota Surabaya. Keadaan dimana telah ditemukan solusinya dan kembali ke keadaan semula atau normal disebut keadaan equilibrium.

Selain itu, menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Pokok pemikirannya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu akan hilang dengan sendirinya.⁴⁴

Pernyataan diatas didukung dengan prinsip-prinsip pokok fungsionalisme struktural menurut Stephen K. Sanderson (1993:3) sebagai berikut:

“(1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lain. (2) Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu eksistensi suatu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat didefinisikan. (3) Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkan menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. (4) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau homeostatis (tetap) dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan

⁴⁴ George Ritzer, . *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 21.

penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas. (5) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat. Tetapi bila ia terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.”⁴⁵

Dalam pemahaman Robert K. Merton, suatu pranata atau institusi tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya akan dis fungsional terhadap unit sosial yang lain. Pandangan ini dapat memasuki konsep Merton yaitu mengenai sifat dan fungsi. Merton membedakan atas fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes (manifest) adalah fungsi yang diharapkan. Contohnya pemulung yang menyewa rumah (ngekost) pada penduduk sekitar akan memberi uang tambahan kepada penduduk dan LPA memberikan fasilitas-fasilitas yang berguna untuk penduduk sekitar. Sedangkan fungsi laten adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak di harapkan. Contohnya keberadaan LPA yang membawa dampak buruk bagi kesehatan dan tata ruang daerah tersebut.⁴⁶

Pemulung kebanyakan merupakan penduduk pendatang di suatu daerah. Profesinya sebagai seorang pemulung membuat mereka dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Kehadiran mereka kurang diharapkan oleh masyarakat karena dianggap dapat mengotori daerah mereka. Keadaan yang seperti inilah yang membuat pemulung merasa terasing dan membentuk suatu kelompok sendiri yang terpisah dengan masyarakat sekitar. Tetapi meskipun dikucilkan dalam masyarakat

⁴⁵ Nasrullah , Nazsir,.. *Teori-Teori Sosiologi*. (Bandung : Widya Padjajaran. 2008) hal. 10

⁴⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2009), hal. 23.

pemulung tetap ada dan malah terus bertambah. Hal ini terjadi karena jasa yang diberikan para pemulung cukup besar dalam hal membantu kebersihan kota dan pemenuhan barang-barang bekas yang sangat diperlukan oleh sebagian pabrik.

Selain itu, kehadiran pemulung sebenarnya juga ditunggu oleh sebagian masyarakat untuk membantu mereka mengurangi barang-barang bekas dan sampah yang ada di rumah mereka. Apabila tidak adanya pemulung bisa dipastikan banyak orang yang kebingungan membuang semua barang-barang tersebut.

Keberadaan pemulung yang terus bertambah disebabkan karena fungsinya dalam masyarakat cukup besar dan berpengaruh signifikan terhadap fungsi yang lain dan juga berperan dalam menjaga kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat yang dimaksud adalah keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri. Apabila dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut kebersihan tidak terjaga dapat menyebabkan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. Sebagai contoh, keadaan lingkungan yang kotor dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti demam berdarah yang juga dapat menjadi masalah sosial yang kompleks dikarenakan penyakit tersebut dapat menular.

2. Teori Solidaritas

Teori lain yang ikut mendukung teori fungsionalisme struktural adalah teori solidaritas sosial. Menurut Emile Durkheim solidaritas sosial adalah kehadiran keteraturan sosial dalam suatu masyarakat yang

strukturnya solid dan terorganisasi dengan baik.⁴⁷ Menurut Durkheim, masalah sentral dari eksistensi sosial adalah masalah keteraturan solidaritas sosial sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

Masyarakat dengan tipe berbeda-beda mencapai solidaritas sosial dengan cara berbeda pula. Pada masyarakat pra modern yaitu tradisional, dimana manusia hidup dengan cara yang hampir sama satu sama lain, solidaritas yang dicapai secara kurang lebih otomatis. Bentuk solidaritas mekanik inilah yang paling cocok karena merupakan hasil dari pembagian kerja yang sederhana. Sangat sedikit peranan untuk dimainkan, atau cara hidup pun kurang bervariasi karena kebutuhan para anggota masyarakat untuk memandang hidup juga kurang lebih sama. Mereka memiliki aturan-aturan kolektif yang mengatur bagaimana berperilaku yang dipenuhi tanpa kesukaran yang berarti.

Sedangkan solidaritas yang berkembang di masyarakat modern adalah solidaritas organik. Dalam masyarakat modern orang-orang hidup sangat berbeda satu sama lain tetapi karena mereka tergantung satu sama lain dalam aktifitas yang berbeda-beda agar tetap hidup, maka solidaritas organik akan muncul. Solidaritas itulah yang muncul dari saling ketergantungan berbagai individu.⁴⁸

⁴⁷ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 282.

⁴⁸ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 45.

Solidaritas Organik bukan hanya berasal dari kepercayaan pada seseorang melainkan dari saling ketergantungan fungsional di dalam pembagian kerja.⁴⁹ Dalam solidaritas organik perbedaan di antara pribadi-pribadi orang dalam hal ini kepercayaan dan tindakannya. Pertumbuhan pembagian kerja kemudian dikatkan dengan individualisme yang makin meningkat. Gerak maju solidaritas organik dipengaruhi oleh kepercayaan yang dimiliki bersama antar individu, yang tidak hilang sama sekali dalam masyarakat rumit atau masyarakat modern.⁵⁰

Pemulung memegang kendali yang sangat besar dalam rantai perputaran barang-barang bekas, karena bisa dibilang pemulung adalah produsen barang-barang bekas. Ini dikarenakan pemulunglah yang menyediakan barang-barang bekas yang akan dikumpulkan oleh pengepul dan dijual ke pabrik akhirnya akan dijadikan barang jadi oleh pihak pabrik.

Solidaritas yang timbul antara pemulung dan pengepul ini adalah solidaritas organik, dimana anggota masyarakat yang berbeda kedudukan dan pekerjaan saling menggantungkan hidupnya antara satu dan lainnya. Secara tidak sadar mereka saling membutuhkan. Pemulung membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjual barang-barang bekas temuannya kepada pengepul. Begitu pula pengepul juga membutuhkan pemulung untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang bekas yang

⁴⁹ Antony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 95.

⁵⁰ Antony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 96.

nantinya akan disetorkan kepada pabrik. Dari dasar inilah, keberadaan kedua pihak ini tidak dapat dihindarkan dalam proses daur ulang sampah.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. *Yuli Masfufah, Asimilasi pemulung dengan warga masyarakat di kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah, Prodi Sosiologi, 2007.* Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. peneliti tertarik karena perbedaan profesi ini ternyata berakibat terhadap kehidupan sosial. Seolah-olah ada tembok pemisah yang tebal dan tinggi antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang sama-sama berdomisili di wilayah yang sama. Sehingga, penelitian ini berfokus pada proses interaksi antara pemulung dengan masyarakat asli akibat yang ditimbulkan dari interaksi tersebut.
2. *Dewi Susiati Napitupulu, Makna barang-barang bekas bagi pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Cilincing Jakarta Utara. Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi, 2008.* Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada pemaknaan barang-barang bekas oleh pemulung dan usaha pemulung untuk mengubah harga jual barang-barang tersebut agar lebih tinggi. Para pemulung selain melakukan kegiatan memulung juga melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk menaikkan harga barang bekas tersebut. Seperti, membuang label botol aqua sehingga mendapatkan botol yang bersih. Botol yang telah bersih ini lebih mahal

harganya dibanding dengan botol yang masih bersegel. Selain itu pemulung juga lebih memilih dan menyukai barang-barang bekas yang mudah ditemukan seperti plastik dan kertas walaupun harganya relatif rendah daripada barang-barang bekas jenis aluminium, tembaga atau logam yang harganya tinggi tetapi sulit ditemukan. Hal ini berdampak pada penjualan barang tersebut yang lebih lama dan lebih lama pula mereka akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

3. *Susianingsih, Kajian geografis kegiatan pemulung jalanan di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Geografi, 2010.* penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan angket yang disebar kepada 100 pemulung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal-usul dan penyebaran pemulung jalanan, kondisi ekonomi, dan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya pemulung jalanan tersebut. Menurut penelitian ini faktor utama yang menyebabkan munculnya pemulung jalanan tidak lain adalah lemahnya kondisi perekonomian di pedesaan, dimana desa tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup warganya secara memadai. Kondisi inilah yang mendorong semakin banyaknya warga yang pindah ke kota, dengan harapan akan memperoleh mata pencarian yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya dengan lebih baik. Karena harapan yang tidak terpenuhi itulah maka mereka mencari alternatif lain yang dapat ditempuh sesuai dengan kemampuan sendiri dan tidak memiliki banyak modal yaitu menjadi seorang pemulung.

4. *Y. Argo Twikromo, In the shadow of a dominant culture: the construction of marginality among nomadic scavengers in Yogyakarta (terjemahan: pemulung jalanan Yogyakarta, konstruksi marginalitas dan perjuangan hidup dalam bayang-bayang budaya dominan. untuk memperoleh gelar master of art dalam bidang Antropologi, Faculty of the Graduate School of Art and Sciences, Ateneo de Manila University.* Penelitian ini menekankan pada konstruksi sosial dan budaya marginalitas di kalangan pemulung jalanan (pemulung yang hidup atau tidur dijalanan) kota Yogyakarta. Berkaitan dengan konstruksi tersebut, penelitian ini memperdebatkan hubungan antara pemulung jalanan dengan pemerintah dan pengaruh hubungan tersebut terhadap masing-masing pihak. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana peraturan-peraturan pemerintah di suatu lingkungan kota telah mempengaruhi pandangan pemulung jalanan tersebut tentang realitas sosial-budaya mereka. Selain itu, juga memberikan analisis tentang strategi-strategi pemulung jalanan untuk melawan tekanan-tekanan dalam masyarakat kota dan peraturan-peraturan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan, antara lain, pertama, pemerintah seharusnya menjalankan kekuasaannya tidak dengan menerapkan peraturan-peraturan normatif untuk memberantas pemulung jalanan melalui razia dan intimidasi, tetapi dengan menyediakan ruang dialog bagi mereka. Kedua, karena opsi yang diberikan yakni ikut program transmigrasi atau pulang ke daerah asal ternyata tidak disukai, pemerintah harus memperluas alternatif pilihan bagi pemulung jalanan yang benar-

benar ingin mengubah hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kemungkinan-kemungkinan, misalnya dengan menemukan cara untuk mengakomodasi pemulung jalanan dalam lingkungan kota tanpa menempatkan mereka sebagai pengganggu ideologi perkembangan kota. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan cara-cara bagaimana dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat membantu pemulung yang ingin benar-benar mengubah nasibnya. Keempat, dalam kaitannya dengan proses pembuatan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan jalanan, pemerintah diharapkan menjalankan konsultasi yang lebih hati-hati dengan pemulung jalanan.

Perbedaan yang mendalam dari penelitian terdahulu terdapat pada rumusan masalah penelitian kali ini. Penelitian ini memfokuskan pada hubungan pemulung dengan pengepul, respon masyarakat adanya LPA Benowo dan pemulung yang ada di daerahnya. Sedangkan penelitian milik Yuli Masfufah adalah hubungan yang timbul antara pemulung dan masyarakat. Masyarakat menganggap negatif pemulung jalanan yang ada di daerahnya karena mengganggu masyarakat. Tetapi dalam penelitian kali ini masyarakat tidak dirugikan dengan adanya LPA Benowo dan pemulung disekitarnya sebab para pemulung bekerja di LPA tidak berkeliaran di pemukiman warga. Dalam penelitian terdahulu belum membahas kehidupan pemulung tersebut, hanya sekedar mengetahui asal usul pemulung seperti penelitian Susianingsih.

Dalam penelitian Dewi Napitupulu memfokuskan kepada pemaknaan barang-barang bekas yang ditemukan pemulung. Bagaimana cara pemulung dalam menaikkan harga jual barang tersebut. Disini kehidupan pemulung tidak digali secara luas. Sedangkan dalam penelitian Argo Twikromo lebuk memfokuskan kepada label marginalitas yang diterima oleh pemulung di daerah yogyakarta karena pemulung dalam penelitiannya dianggap sebagai orang jalanan yang harus dihilangkan dalam perkembangan suatu kota. Dalam penelitian ini berbeda, karena pemulung dianggap sebagai orang yang berjasa dalam pengurangi sampah dan keberadaannya di legalkan oleh pemerintah.